

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa Kolonial Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling Padangsidimpuan yang dikepalai oleh Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 onder afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang yaitu, Distrik Angkola yang berkedudukan di Padangsidimpuan, Distrik Sipirok yang berkedudukan di Sipirok dan distrik Batang Toru yang berkedudukan di Batang Toru.

Garis-garis besar pembagian administratif Tapanuli tetap sama ketika tinjauan ini dilakukan. Tapanuli Utara, yang dikenal sebagai “*Afdeeling Bataklanden*”, diperintah oleh asisten Residen yang berkedudukan di Tarutung. Sedangkan Asisten Residen Tapanuli Selatan berkedudukan di Padang Sidempuan. Satuan pemerintahan itu bernama *Afdeeling* Padang Sidempuan sesuai dengan nama ibu kotanya. *Afdeeling* lebih kurang serupa dengan Kabupaten. Ibukotanya keresidenan adalah Sibolga, yang daerah sekitarnya tidak termasuk kedalam kedua *Afdeeling* tersebut.

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat (Desa) yang dikepalai oleh seorang *Kepala Luhat* dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang dibantu oleh seorang *Kepala Ripo* (*Kepala Dusun*) apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya. Daerah

Angkola Sipiok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua.

Setelah hampir sebulan lamanya tentara Belanda menduduki Kota Sipiok, mereka mulai melakukan patroli ke luar kota. Patroli Belanda pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari 1949. Pada waktu itu patroli itu mendapat serangan pertama, di kampung poldung, yang berjarak sekitar 6 kilometer dari Kota Sipiok. Pasukan Belanda itu dicegat oleh para Gerilya. Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidempuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap seperti biasa, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipiok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan.

Setelah gerakan kaum Padri ditumpas pada 1830-an, untuk menggenapkan kekuasaannya di sumatra barat, belanda membentuk distrik (unit pemerintahan yang kurang lebih sama dengan kewedanaan di jawa) mandaling, angkola, serta teluk tapanuli. Ketiga daerah itu termasuk dalam wilayah utara di bawah

kekuasaan Gubernur Pantai Barat Sumatra. Secara bertahap, dan umumnya tanpa menggunakan banyak kekerasan, daerah-daerah lain digabungkan. Pada permulaan abad ke-20, seiring berkembangnya industri perkebunan di Sumatra Timur dan menjelang berakhirnya perlawanan orang Aceh diujung utara Pulau Sumatra yang telah berlangsung lama, “petak-petak putih” yang tersisa dalam peta disela-sela daerah kekuasaan belanda di anggap sebagai gangguan dan di isi dengan agal tergesah-gesah. “petak putih” terakhir yang terletak diperbatasan Tapanuli dan Sumatra Timur hanya bertahan sampai 1915.

Kajian terhadap pemekaran wilayah atau pembentukan daerah tidak lepas dari persoalan otonomi daerah yang berkembang sejak masa reformasi. Otonomi daerah pasca reformasi melalui sistem pemerintahan yang berlangsung, semakin menimbulkan minat di daerah-daerah lain untuk melakukan pemekaran. Pada pasal 1(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. *Simanjuntak(2013:66)*.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, misalnya untuk penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan. Disamping itu diberikan juga standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Sejalan dengan itu,

pemerintah wajib memfasilitasi, berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Simanjuntak(2013:67)*.

Keberadaan Kecamatan Sipirok sekarang menjadi sebuah fenomena menarik untuk di kaji dan untuk diteliti. Minimnya penulisan tentang pemekaran Sipirok, merupakan alasan lain mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti mencoba menelusuri keberadaan tersebut dengan judul **“Strategi Pengembangan Wilayah Sipirok Setelah Menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Latar belakang pemekaran Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Strategi Tentang Pengembangan Wilayah Pemekaran Sipirok
3. Perkembangan Pelaksanaan Serta Mekanisme Program Di Kecamatan Sipirok Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu :“Strategi Pengembangan Wilayah Sipirok Setelah Menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan”.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang pemekaran Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapnuli Selatan ?
2. Bagaimana Strategi Tentang Pengembangan Wilayah Pemekaran Sipirok?
3. Bagaimana Pelaksanaan Serta Mekanisme Program Di Kecamatan Sipirok Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapnuli Selatan.
2. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Wilayah Pemekaran Sipirok.

3. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Mekanisme Program Di Kecamatan Sipirok sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai Pemekaran Sipirok Menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Menambah pengetahuan masyarakat, khususnya mahasiswa sejarah tentang adanya Pemekaran Sipirok Menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
4. Sebagai landasan bagi masyarakat dan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam usaha pelestarian nilai-nilai kesejarahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah Unimed khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.